



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

RENCANA KERJA

TAHUN 2025



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah tahun 2025 merupakan dokumen sebagai dasar dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta mempunyai orientasi pada hasil yang diharapkan.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini juga merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategik (Renstra) yang akan diwujudkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah yang berjangka waktu 2 (dua) tahun yaitu tahun 2025–2026. Rencana Kerja (Renja) juga menggambarkan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan yang akan dicapai pada tahun 2025 sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi. Selain itu Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini memuat berbagai program yang dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai macam kegiatan dan sub kegiatan.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah juga memuat tentang indikator-indikator kinerja kegiatan berupa masukan (input), keluaran (outputs) dan hasil (outcome) yang secara langsung atau tidak langsung dapat mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian



sasaran. Sehingga dengan dokumen rencana kinerja juga merupakan suatu jembatan yang menghubungkan antara rencana strategik yang telah ditetapkan dan Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan sistem penganggarnya.

Demikian penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025, untuk dimanfaatkan sesuai dengan kepentingannya.

Mempawah, 29 Februari 2024

KEPALA BPKAD
KABUPATEN MEMPAWAH



Dra. IRNAWATI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19720510 199203 2 009



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika	8
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	12
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	15
2.4. Review terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah	17
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	18
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	19
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	19
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	19
3.3. Program dan Kegiatan	21
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	24
BAB V. PENUTUP	25
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah adalah pemerintah dalam menjalankan *pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government)*. Orientasi pada input dimaksudkan terutama pada fokus kemaslahatan bagi masyarakat, serta berupa upaya untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi. Sehingga misi dan visi yang diemban oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah yang tertuang dalam Peraturan Bupati Mempawah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah



Kabupaten Mempawah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah. Dan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan di bidang Keuangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA). Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah mempunyai fungsi yaitu sebagai berikut :

- a. Perumusan program kerja di bidang Keuangan dan Aset;
- b. Perumusan kebijakan di bidang Keuangan dan Aset;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Keuangan dan Aset;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Keuangan dan Aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Pengoordinasian dan pembinaan teknis di bidang Keuangan dan Aset;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Keuangan dan Aset;
- g. Pelaksanaan administrasi badan di bidang Keuangan dan Aset;
- h. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Badan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati di bidang Keuangan dan Aset sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

Berdasarkan fungsi sebagaimana tersebut diatas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibentuk di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah juga merangkap sebagai kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang menerima pelimpahan wewenang pengelolaan keuangan daerah dari Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian terdapat 2 (dua) fungsi yang melekat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yaitu Kepala Satuan Kerja

Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran (PA) Pengguna Barang (PB).

Dengan demikian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi dan elemen pokok di Kabupaten Mempawah untuk melaksanakan pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah. Maka Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 yang disusun oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah digunakan sebagai landasan melaksanakan fungsi. Sehingga tujuan/sasaran strategis sebagaimana dalam Rencana Strategis yang telah ditetapkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat direalisasikan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) juga sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam kedua peraturan sebagaimana tersebut dinyatakan bahwa

setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

1.2. LANDASAN HUKUM

Sebagai landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Landasan idiil Pancasila;
2. Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945;
3. Landasan operasional:
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
 - b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
 - c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- g. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah.
- i. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah tahun 2025 dimaksudkan sebagai bagian untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah sekaligus sebagai acuan dan pedoman penyusunan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2025 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk itu, tujuan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Menegaskan tujuan, sasaran, program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah tahun 2025 yang merupakan implementasi dari Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 – 2026;
2. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tujuan, sasaran, program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025;

3. Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi serta dalam rangka menilai kinerja organisasi;
4. Tersedianya instrumen yang akan menjadi panduan setiap pegawai di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam berpikir, bersikap dan bertindak untuk pencapaian tujuan organisasi.

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Mempawah Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat



Daerah

- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN, PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka pengelola keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPD pengelola keuangan melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Mempawah Nomor 88 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah, perlu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja BPKAD Tahun 2025 dan Capaian Renstra BPKAD yang merupakan Aktualisasi dari RENSTRA Tahun 2025-2026.

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024

Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024, terdiri dari 3 (tiga) Program, 14 (empat belas) Kegiatan dan 62 (enam puluh dua) Sub Kegiatan.

Dari 3 (tiga) Program tersebut, 1 (satu) program merupakan program penunjang yang diarahkan untuk



kegiatan-kegiatan yang mendukung operasional dan peningkatan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Program dan kegiatan tahun 2024 serta tujuan dan sasaran dari masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan tergambar dalam Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPKAD dan Pencapaian Renstra BPKAD sampai dengan Tahun 2024 (tahun berjalan) sebagaimana tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kabupaten Mempawah

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah n-1)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.		Urusan penunjang Urusan Pemerintahan									
5.02		Keuangan									
5.02	02.	Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran, perbendaharaan dan laporan keuangan daerah sesuai ketentuan	100	100	100	100	100%	100	300	75,0
5.02	02.2.01	- Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	- Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran	100	100	100	100	100%	100	300	75,0
5.02	02.2.01 01	- Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS	- Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang tersusun	2	2	2	2	100%	2	6	1,5
5.02	02.2.01 02	- Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan PPAS	- Jumlah dokumen perubahan KUA dan PPAS yang tersusun	2	2	2	2	100%	2	6	1,5
5.02	02.2.01 03	- Koordinasi, penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD	- Jumlah dokumen verifikasi RKA-SKPD yang tersusun	31	31	31	31	100%	31	93	23,25
5.02	02.2.01 04	- Koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan RKA-SKPD	- Jumlah dokumen verifikasi perubahan RKA-SKPD yang tersusun	31	31	31	31	100%	31	93	23,25
5.02	02.2.01 05	- Koordinasi, penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD	- Jumlah dokumen verifikasi DPA-SKPD yang tersusun	31	31	31	31	100%	31	93	23,25
5.02	02.2.01 06	- Koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan DPA-SKPD	- Jumlah dokumen verifikasi perubahan DPA-SKPD yang tersusun	31	31	31	31	100%	31	93	23,25
5.02	02.2.01 07	- Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	- Jumlah dokumen peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang tersusun	2	2	2	2	100%	2	6	1,5

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah n-1)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.02	02.2.01 08	- Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD	- Jumlah dokumen peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD yang tersusun	2	2	2	2	100%	2	6	1,5
5.02	02.2.01 09	- Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan anggaran	- Jumlah dokumen tentang regulasi serta kebijakan anggaran yang tersusun	4	4	4	4	100%	4	12	3
5.02	02.2.02	- Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	- Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen pengelolaan perbendaharaan daerah	100	100	100	100	100%	100	300	75
5.02	02.2.02 01	- Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	- Dokumen kas daerah/dokumen (B9) yang dikelola dalam setahun	264	264	264	264	100%	264	792	198
5.02	02.2.02 03	- Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	- Dokumen anggaran kas dan SPD	860	860	860	860	100%	860	2580	645
5.02	02.2.02 05	- Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	- Dokumen Pengelolaan dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	7	7	7	7	100%	7	21	5,25
5.02	02.2.02 06	- Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank	- Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan transaksi non tunai	12	12	12	12	100%	12	36	9

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah n-1)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.02	02.2.02 07	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	- Dokumen Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) yang tersusun	2	2	2	2	100%	2	6	1,5
5.02	02.2.02 09	- Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	- Dokumen penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D yang direkonsiliasi setiap tahunnya	12	12	12	12	100%	12	36	9
5.02	02.2.02 10	- Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	- Dokumen Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan yang tersusun	20	20	20	20	100%	20	60	15
5.02	02.2.02 11	- Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	- Perangkat daerah yang mengikuti pembinaan penatausahaan keuangan	31	31	31	31	100%	31	93	23,25
5.02	02.2.03	- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	- Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen laporan keuangan daerah	100	100	100	100	100%	100	300	75
5.02	02.2.03 01	- Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	- Dokumen berita acara Rekon Kas Penerimaan dan Rekon Kas Pengeluaran	124	124	124	124	100%	124	372	93
5.02	02.2.03 02	- Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	- Dokumen Rekonsiliasi Pendapatan Transfer, Belanja dan Pembiayaan	15	15	15	15	100%	15	45	11,25

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah n-1)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.02	02.2.03 03	- Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran yang tersusun	2	2	2	2	100%	2	6	1,5
5.02	02.2.03 04	- Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	- Dokumen Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	2	2	2	2	100%	2	6	1,5
5.02	02.2.03 05	- Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	- Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota yang tersusun	4	4	4	4	100%	4	12	3
5.02	02.2.03 06	- Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	- Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang tersusun	1	1	1	1	100%	1	3	0,75
5.02	02.2.03 08	- Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	- Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang tersusun	1	1	1	1	100%	1	3	0,75
5.02	02.2.03 09	- Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	- Dokumen Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah yang tersusun	2	2	2	2	100%	2	6	1,5
5.02	02.2.03 10	- Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	- Dokumen Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tersusun	1	-	-	-	-	-	-	-

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah n-1)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.02	02.2.03 11	- Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	- Dokumen pendukung dalam proses penyelesaian laporan keuangan SKPD	31	31	31	31	100%	31	93	23,25
5.02	02.2.03 12	- Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	- Jumlah Perangkat daerah yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	10	22	25	25	100%	25	72	18
5.02	02.2.04	- Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	- Persentase ketepatan waktu pencairan dana bantuan keuangan, dana bagi hasil dan dana darurat mendesak	100	100	100	100	100%	100	300	75
5.02	02.2.04 08	- Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	- Jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	1	1	1	1	100%	1	3	0,75
5.02	02.2.04 09	- Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	- Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak	1	1	1	1	100%	1	3	0,75
5.02	02.2.04 10	- Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	- Jumlah laporan hasil pengelolaan dana bagi hasil kabupaten/kota	1	1	1	1	100%	1	3	0,75
5.02	02.2.05	- Pengelolaan Data Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	- Persentase ketepatan waktu penyelesaian data Data Sistem Informasi Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100%	100	300	75
5.02	02.2.05 02	- Implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah	- Jumlah dokumen hasil implementasi dan pemeliharaan sisten informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah	1	1	1	1	100%	1	3	0,75
5.02	03	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen barang milik daerah sesuai ketentuan	100	100	100	100	100%	100	300	75
5.02	03.2.01	- Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Penatausahaan, Penggunaan , Pemanfaatan, Pengamanan, Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD yang sesuai ketentuan	100	100	100	100	100%	100	300	75
5.02	03.2.01 01	- Penyusunan Standar Satuan Harga	- Jumlah standar satuan harga yang disusun	1	1	1	1	100%	1	3	0,75

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah n-1)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.02	03.2.01 02	- Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	- Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1	0	1	1	100%	2	3	0,75
5.02	03.2.01 03	- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	- Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah	5	5	5	5	100%	5	15	3,75
5.02	03.2.01 04	- Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Jumlah Kebijakan Pengelolaan barang milik daerah	2	5	5	5	100%	5	15	3,75
5.02	03.2.01 05	- Penatausahaan Barang Milik Daerah	- Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah	1	1	1	1	100%	1	3	0,75
5.02	03.2.01 06	- Inventarisasi Barang Milik Daerah	- Jumlah laporan hasil inventarisasi (LHI) barang milik daerah	1	0	1	1	-	1	2	0,5
5.02	03.2.01 07	- Pengamanan Barang Milik Daerah	- Jumlah laporan hasil Pengamanan barang milik daerah	3	3	3	3	100%	3	9	2,25
5.02	03.2.01 08	- Penilaian Barang Milik Daerah	- Jumlah laporan Hasil Penilaian BMD dan hasil koordinasi penilaian BMD	2	7	2	2	100%	2	11	2,75
5.02	03.2.01 09	- Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang	- Jumlah laporan hasil pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMD	5	5	5	5	100%	5	15	3,75
5.02	03.2.01 10	- Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	- Jumlah Dokumen hasil optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD	20	18	20	20	100%	20	58	14,5
5.02	03.2.01 11	- Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang milik Daerah	- Jumlah laporan hasil rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan BMD	3	35	3	3	100%	3	41	10,25
5.02	03.2.01 12	- Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	- Dokumen Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	1	1	1	1	100%	1	3	0,75
5.02	03.2.01 13	- Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	- Jumlah orang yang mengikuti pembinaan pengelolaan BMD pemerintah kabupaten/kota	31	31	31	31	100%	31	93	23,25

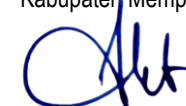
Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah n-1)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.02	01	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100	100	100%	100	300	75
5.02	01.2.01	- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Persentase ketepatan waktu penyelesaian dokumen perencanaan	100	100	100	100	100%	100	300	75
5.02	01.2.01 01	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	2	2	100%	2	6	1,5
5.02	01.2.01 02	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1	1	1	1	100%	1	3	0,75
5.02	01.2.01 03	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1	1	1	1	100%	1	3	0,75
5.02	01.2.01 04	- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	- Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1	1	1	1	100%	1	3	0,75
5.02	01.2.01 05	- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	- Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1	1	1	1	100%	1	3	0,75
5.02	01.2.01 06	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3	3	3	3	100%	3	9	2,25
5.02	01.2.02	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Persentase ketepatan waktu pengelolaan administrasi	100	100	100	100	100%	100	300	75
5.02	01.2.02 01	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	62	62	62	62	100%	62	186	46,5
5.02	01.2.02 03	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	1	1	1	100%	1	3	0,75

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah n-1)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.02	01.2.02 05	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1	1	1	1	100%	1	3	0,75
5.02	01.2.02 07	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	- Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	1	1	1	100%	1	3	0,75
5.02	01.2.03	- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	- Persentase ketepatan waktu pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	100	100	100	100%	100	300	75
5.02	01.2.03 01	- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	1	1	1	1	100%	1	3	0,75
5.02	01	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100	100	100%	100	300	75
5.02	01.2.05	- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	100	100	100	100%	100	300	75
5.02	01.2.05 02	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	- Jumlah pakaian dinas beserta atributnya	49	55	55	55	100%	55	165	41,25
5.02	01.2.05 10	- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-	10	7	10	10	100%	10	27	6,75
5.02	01	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100	100	100%	100	300	75
5.02	01.2.06	- Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	100	100	100	100	100%	100	300	75
5.02	01.2.06 01	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	1	1	1	100%	1	3	0,75
5.02	01.2.06 02	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	1	1	1	100%	1	3	0,75

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah n-1)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.02	01.2.06 04	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	1	1	1	100%	1	3	0,75
5.02	01.2.06 05	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1	1	1	1	100%	1	3	0,75
5.02	01.2.06 07	- Penyediaan Bahan/Material	- Jumlah paket bahan/material yang disediakan	1	1	1	1	100%	1	3	0,75
5.02	01.2.06 09	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	7	7	7	7	100%	7	21	5,25
5.02	01.2.06 10	- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	- Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	4500	1500	1500	1500	100%	1500	4500	1125
5.02	01.2.07	- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100	100	100	100	100%	100	300	75
5.02	01.2.07 02	- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	2	0	2	2	100%	2	4	1
5.02	01.2.07 06	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1	1	1	1	100%	1	3	0,75
5.02	01.2.07 10	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1	1	1	1	100%	1	3	0,75
5.02	01.2.08	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Persentase kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dapat terpenuhi	100	100	100	100	100%	100	300	75
5.02	01.2.08 01	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	150	50	150	150	100%	150	350	87,5
5.02	01.2.08 02	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	36	36	36	36	100%	36	108	27
5.02	01.2.08 04	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	5	12	12	100%	12	29	7,25

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah n-1)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.02	01.2.09	- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100	100	100	100	100%	100	300	75
5.02	01.2.09 01	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1	1	1	1	100%	1	3	0,75
5.02	01.2.09 02	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	21	21	21	21	100%	21	63	15,75
5.02	01.2.09 09	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	1	1	1	100%	1	3	0,75
5.02	01.2.09 10	- Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	- Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	52	1	1	100%	1	54	13,5
5.02	01.2.09 11	- Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	- Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2	26	2	2	100%	2	30	7,5

Mempawah, 2024
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Mempawah



Dra. IRNAWATI, M.Si
NIP. 19720510 199203 2 009

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, BPKAD mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang di bidang keuangan dan aset daerah dan tugas pembantuan.

Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan program kerja di bidang Keuangan dan Aset;
- b. Perumusan kebijakan di bidang Keuangan dan Aset;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Keuangan dan Aset;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Keuangan dan Aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengoordinasian dan pembinaan teknis di bidang Keuangan dan Aset;

- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Keuangan dan Aset;
- g. Pelaksanaan administrasi badan di bidang Keuangan dan Aset;
- h. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Badan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati di bidang Keuangan dan Aset sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

Dari uraian tugas pokok dan fungsi tersebut, BPKAD memiliki tugas yang cukup strategis dalam menyusun kebijakan teknis pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Pengkoordinasian penyusunan Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Perubahannya serta Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Disamping itu, BPKAD juga mempunyai tugas untuk menyusun perencanaan Belanja, pengelolaan keuangan daerah serta penyelenggaraan perbendaharaan umum daerah. Dari tugas dan fungsi BPKAD diatas, BPKAD mempunyai indikator kinerja pada urusan keuangan yaitu :

1. Persentase Ketepatan Waktu Penetapan APBD.
2. Persentase Penerbitan SP2D Tepat Waktu.



3. Persentase Kesesuaian dan Ketepatan Waktu Penyajian Laporan Keuangan Daerah.
4. Persentase Aset Daerah yang Terinventarisasi dalam Aplikasi.

Adapun pencapaian pelayanan kinerja BPKAD sesuai indikator diatas dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel. 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Mempawah

No.	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Ketepatan Waktu Penetapan APBD	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Paling lambat akhir Desember tahun anggaran sebelumnya
2	Persentase Penerbitan SP2D Tepat Waktu	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	SP2D terbit maks 2 hari stlh SPM terverifikasi
3	Persentase Kesesuaian dan Ketepatan Waktu Penyajian Laporan Keuangan Daerah	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pemyampaian LKD paling lambat 31 Maret tahun berikutnya
4	Persentase Aset Daerah yang Terinventarisasi dalam Aplikasi	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Seluruh Aset Daerah tercatat dalam Aplikasi

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah. Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal akan berdampak pada pelaksanaan peran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah untuk tahun 2025-2026.

2.3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Permasalahan yang dihadapi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, antara lain adalah :

1. Regulasi di bidang pengelolaan keuangan yang sangat dinamis sehingga memerlukan penyesuaian dalam implementasinya;
2. Jumlah SDM yang masih terbatas dibanding dengan volume pekerjaan yang ada;
3. Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai;

4. Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang masih belum optimal ;
5. Advokasi dan verifikasi penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD yang masih kurang optimal sehingga berimbas pada konsistensi dan sinkronisasi APBD dengan dokumen perencanaan daerah ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas diperkirakan akan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah kedepan, maka perlu dikembangkan upaya tindaklanjut sebagai berikut :

1. Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur guna menunjang pelaksanaan keseluruhan proses pengelolaan keuangan daerah.
3. Optimalisasi sistem informasi yang ada untuk mendukung penerapan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.
4. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi baik secara horizontal maupun vertikal.
5. Peningkatan fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana serta aset Badan.

2.4 REVEIW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKP

Review terhadap rancangan awal RKP dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra BPKAD dengan hasil pencapaian target tahunan.

Rancangan awal Renja yang telah disusun oleh BPKAD telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja BPKAD.

Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra BPKAD yang dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Disamping itu dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta indikator kinerja dan rencana capaiannya. Usulan program dan kegiatan dalam Renja BPKAD senantiasa diselaraskan dengan Renstra BPKAD dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang dapat dilihat pada Review terhadap Rancangan Awal RKP tahun 2025 sebagaimana table 2.3 di bawah ini :

Tabel. 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025
Kabupaten Mempawah

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode Rek	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase capaian urusan pemerintah daerah	100%	Rp 7.294.594,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase capaian urusan pemerintah daerah	100%	Rp 7.294.594,00	
1.2.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketetapan waktu penyelesaian dokumen perencanaan	100%	Rp 70.000,00	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketetapan waktu penyelesaian dokumen perencanaan	100%	Rp 70.000,00	
1.2.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Rp 15.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Rp 15.000,00	
1.2.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 10.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 10.000,00	
1.2.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 7.500,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 7.500,00	
1.2.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 10.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 10.000,00	
1.2.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 7.500,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 7.500,00	
1.2.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPKAD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Rp 20.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPKAD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	Rp 20.000,00	
1.2.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	Rp 5.034.970,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	Rp 5.034.970,00	
1.2.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKAD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/Bulan	Rp 4.950.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKAD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/Bulan	Rp 4.950.000,00	
1.2.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Rp 44.970,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Rp 44.970,00	
1.2.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPKAD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp 30.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPKAD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp 30.000,00	
1.2.2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BPKAD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Rp 10.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BPKAD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Rp 10.000,00	
1.2.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	Rp 23.400,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	Rp 23.400,00	
1.2.3.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BPKAD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	1 laporan	Rp 23.400,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BPKAD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	1 laporan	Rp 23.400,00	
1.2.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi kepegawaian pada perangkat daerah	100%	Rp 82.443,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi kepegawaian pada perangkat daerah	100%	Rp 82.443,00	
1.2.5.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BPKAD	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	49 Paket	Rp 32.443,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BPKAD	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	49 Paket	Rp 32.443,00	
1.2.5.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	BPKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 orang	Rp 50.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	BPKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 orang	Rp 50.000,00	
1.2.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	Rp 394.330,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	Rp 394.330,00	

Kode Rek	Rancangan Awal RKPД					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1.2.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPKAD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	Rp 33.396,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPKAD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	Rp 33.396,00	
1.2.6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPKAD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	Rp 76.829,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPKAD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	Rp 76.829,00	
1.2.6.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPKAD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	Rp 47.916,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPKAD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	Rp 47.916,00	
1.2.6.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BPKAD	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	Rp 69.209,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BPKAD	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	Rp 69.209,00	
1.2.6.7	Penyediaan Bahan/Material	BPKAD	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	Rp 39.930,00	Penyediaan Bahan/Material	BPKAD	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	Rp 39.930,00	
1.2.6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKAD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	Rp 84.700,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKAD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	Rp 84.700,00	
1.2.6.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4500 Dokumen	Rp 42.350,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4500 Dokumen	Rp 42.350,00	
1.2.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	Rp 1.205.601,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	Rp 1.205.601,00	
1.2.7.2	Pengadaan kendaraan dinas operasional dan lapangan	BPKAD	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 unit	Rp 432.500,00	Pengadaan kendaraan dinas operasional dan lapangan	BPKAD	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 unit	Rp 432.500,00	
1.2.7.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPKAD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	Rp -	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPKAD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	Rp -	
1.2.7.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPKAD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	Rp -	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPKAD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	Rp -	
1.2.7.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPKAD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	154 buah	Rp 773.101,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPKAD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	154 buah	Rp 773.101,00	
1.2.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan kantor	100%	Rp 362.600,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan kantor	100%	Rp 362.600,00	
1.2.8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPKAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Rp -	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPKAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Rp -	
1.2.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPKAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	Rp 240.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPKAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	Rp 240.000,00	
1.2.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPKAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	Rp 122.600,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	BPKAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	Rp 122.600,00	
1.2.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah	100%	Rp 121.250,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah	100%	Rp 121.250,00	
1.2.9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPKAD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	Rp 23.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPKAD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	Rp 23.000,00	
1.2.9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPKAD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 unit	Rp 42.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPKAD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 unit	Rp 42.000,00	
1.2.9.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPKAD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 gedung	Rp 5.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPKAD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 gedung	Rp 5.000,00	
1.2.9.10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	BPKAD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	53 unit	Rp 21.500,00	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	BPKAD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	53 unit	Rp 21.500,00	
1.2.9.11	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	BPKAD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 unit	Rp 29.750,00	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	BPKAD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 unit	Rp 29.750,00	
2.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen penganggaran, perbendaharaan dan pelaporan keuangan daerah	100%	Rp 149.166.495,00	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen penganggaran, perbendaharaan dan pelaporan keuangan daerah	100%	Rp 149.166.495,00	
2.2.1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran	100%	Rp 2.391.553,00	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran	100%	Rp 2.391.553,00	

Kode Rek	Rancangan Awal RKPd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
2.2.1.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BPKAD	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 dokumen	Rp 278.745,00	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BPKAD	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 dokumen	Rp 278.745,00	
2.2.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BPKAD	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 dokumen	Rp 215.352,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BPKAD	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 dokumen	Rp 215.352,00	
2.2.1.3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	BPKAD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	31 Dokumen	Rp 166.063,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	BPKAD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	31 Dokumen	Rp 166.063,00	
2.2.1.4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	BPKAD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	31 Dokumen	Rp 185.756,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	BPKAD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	31 Dokumen	Rp 185.756,00	
2.2.1.5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	BPKAD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	31 Dokumen	Rp 83.475,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	BPKAD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	31 Dokumen	Rp 83.475,00	
2.2.1.6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	BPKAD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	31 Dokumen	Rp 98.600,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	BPKAD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	31 Dokumen	Rp 98.600,00	
2.2.1.7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKAD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 dokumen	Rp 604.782,00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKAD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 dokumen	Rp 604.782,00	
2.2.1.8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 dokumen	Rp 538.590,00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 dokumen	Rp 538.590,00	
2.2.1.9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BPKAD	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	4 Dokumen	Rp 220.190,00	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BPKAD	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	4 Dokumen	Rp 220.190,00	
2.2.2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perbendaharaan	100%	Rp 688.484,00	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perbendaharaan	100%	Rp 688.484,00	
2.2.2.1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	264 dokumen	Rp 24.200,00	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	264 dokumen	Rp 24.200,00	
2.2.2.3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	860 dokumen	Rp 33.275,00	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	860 dokumen	Rp 33.275,00	
2.2.2.5	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	7 dokumen	Rp 78.650,00	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	7 dokumen	Rp 78.650,00	
2.2.2.6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	12 dokumen	Rp 47.789,00	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	12 dokumen	Rp 47.789,00	
2.2.2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	BPKAD	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2 laporan	Rp 203.280,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	BPKAD	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2 laporan	Rp 203.280,00	
2.2.2.9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 dokumen	Rp 227.480,00	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 dokumen	Rp 227.480,00	
2.2.2.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	BPKAD	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	20 dokumen	Rp 40.535,00	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	BPKAD	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	20 dokumen	Rp 40.535,00	
2.2.2.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	31 orang	Rp 33.275,00	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	31 orang	Rp 33.275,00	

Kode Rek	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
2.2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen pelaporan keuangan daerah	100%	Rp 1.130.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen pelaporan keuangan daerah	100%	Rp 1.130.000,00	
2.2.3.1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	124 laporan	Rp 40.000,00	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	n/a	Rp 40.000,00	
2.2.3.2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	15 dokumen	Rp 215.000,00	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	15 dokumen	Rp 215.000,00	
2.2.3.3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BPKAD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	2 laporan	Rp 40.000,00	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BPKAD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	2 laporan	Rp 40.000,00	
2.2.3.4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2 laporan	Rp 290.000,00	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2 dokumen	Rp 290.000,00	
2.2.3.5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4 dokumen	Rp 250.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4 dokumen	Rp 250.000,00	
2.2.3.6	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 dokumen	Rp 40.000,00	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 dokumen	Rp 40.000,00	
2.2.3.8	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 dokumen	Rp 40.000,00	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 dokumen	Rp 40.000,00	
2.2.3.9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	BPKAD	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	2 dokumen	Rp 75.000,00	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	BPKAD	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	2 dokumen	Rp 75.000,00	
2.2.3.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKAD	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 dokumen	Rp 50.000,00	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKAD	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 dokumen	Rp 50.000,00	
2.2.3.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	31 orang	Rp 50.000,00	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	31 orang	Rp 50.000,00	
2.2.3.12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota		Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	1 lembaga	Rp 40.000,00	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota		Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	1 lembaga	Rp 40.000,00	
2.2.4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase capaian pelaksanaan kegiatan penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	Rp 144.458.458,00	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100	Persentase capaian pelaksanaan kegiatan penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	Rp 144.458.458,00	
2.2.4.8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 laporan	Rp 130.000.000,00	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 laporan	Rp 130.000.000,00	
2.2.4.9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 laporan	Rp 7.000.000,00	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 laporan	Rp 7.000.000,00	
2.2.4.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 laporan	Rp 7.458.458,00	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 laporan	Rp 7.458.458,00	
2.2.5	Pengelolaan Data Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		Persentase capaian Pengelolaan Data Sistem Informasi Pemerintah Daerah	100%	Rp 498.000,00	Pengelolaan Data Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		Persentase capaian Pengelolaan Data Sistem Informasi Pemerintah Daerah	100%	Rp 498.000,00	
2.2.5.2	Implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 dokumen	Rp 498.000,00	Implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 dokumen	Rp 498.000,00	
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen barang milik daerah sesuai ketentuan	100%	Rp 3.530.843,00	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	100	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen barang milik daerah sesuai ketentuan	100%	Rp 3.530.343,00	

Kode Rek	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
3.2.1	Pengelolaan Barang Milik Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen penatausahaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemindahtanganan dan penghapusan BMD sesuai ketentuan	100%	Rp 3.530.843,00	Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen penatausahaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemindahtanganan dan penghapusan BMD sesuai ketentuan	100%	Rp 3.530.343,00	
3.2.1.1	Penyusunan Standar Harga	BPKAD	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 dokumen	Rp 271.998,00	Penyusunan Standar Harga	BPKAD	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 dokumen	Rp 271.998,00	
3.2.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 dokumen	Rp 146.762,00	Koordinasi dan Penyusunan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 dokumen	Rp 146.762,00	
3.2.1.3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	5 dokumen	Rp 146.762,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	5 dokumen	Rp 146.762,00	
3.2.1.4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	4 dokumen	Rp 273.937,00	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	4 dokumen	Rp 273.937,00	
3.2.1.5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 laporan	Rp 588.662,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 laporan	Rp 588.162,00	
3.2.1.6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	2 laporan	Rp 824.812,00	Inventarisasi Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	2 laporan	Rp 824.812,00	
3.2.1.7	Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	3 laporan	Rp 185.000,00	Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	3 laporan	Rp 185.000,00	
3.2.1.8	Penilaian Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2 laporan	Rp 274.895,00	Penilaian Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2 laporan	Rp 274.895,00	
3.2.1.9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	5 laporan	Rp 165.575,00	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	5 laporan	Rp 165.575,00	
3.2.1.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	10 dokumen	Rp 135.000,00	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	10 dokumen	Rp 135.000,00	
3.2.1.11	Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 laporan	Rp 100.322,00	Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 laporan	Rp 100.322,00	
3.2.1.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 laporan	Rp 155.749,00	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 laporan	Rp 155.749,00	
3.2.1.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	31 orang	Rp 261.369,00	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	31 orang	Rp 261.369,00	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Kajian usulan program dan kegiatan pada tahap ini adalah berasal dari usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung BPKAD, LSM, asosiasi-asosiasi atau perguruan tinggi. Mengingat BPKAD merupakan SKPD yang tidak terkait langsung dengan pelayanan publik, maka telaahan terhadap usulan masyarakat lebih diutamakan dalam upaya penyusunan dokumen perencanaan yang lebih baik dan akuntabel. Sehingga penyajian tabel tentang Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan tidak dapat tersaji.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Beberapa kebijakan nasional dalam perencanaan pembangunan yang harus menjadi acuan pemerintah daerah termasuk SKPD di Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024.
2. Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
3. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan
4. Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit kerja dalam suatu organisasi. Penetapan tujuan tidaklah mutlak harus terukur atau kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa yang akan datang.

Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan ke dalam sasaran. Sasaran merupakan bagian

integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur. Berdasarkan uraian di atas Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah menetapkan tujuan :

1. Meningkatnya Pelayanan Prima kepada Publik.
2. Meningkatnya Penguatan Birokrasi yang Efektif dan Efisien.

dengan sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat.
2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD, yang dikoordinir dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan Pembangunan Daerah. Program Kerja BPKAD Kabupaten Mempawah sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam hal ini BPKAD mempunyai tugas antara lain menyusun Rancangan APBD/Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka BPKAD Kabupaten Mempawah dalam menyusun program dan kegiatan bersifat reguler, mengkoordinir dan memfasilitasi SKPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Mempawah utamanya dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah antara lain :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 - 2) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 - 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
 - 4) Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah



5) Pengelolaan Data Implementasi Sistem Informasi
Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah

c. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan kegiatan
sebagai berikut :

1) Pengelolaan Barang Milik Daerah



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada rumusan Program dan Kegiatan telah sesuai dengan rancangan awal RKPD. Program, Kegiatan dan Pendanaan yang disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana, dengan sumber pendanaan pembangunan daerah yang terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah. Secara keseluruhan rumusan program dan kegiatan BPKAD Kabupaten Mempawah bisa dilihat pada tabel matriks Rencana Kerja BPKAD Kabupaten Mempawah tahun 202 yang tertuang pada Tabel. 4.1 sebagai berikut :

Tabel. 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN MEMPAWAH

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana			
5	02				KEUANGAN								
5	02				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH								
5	02	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase capaian urusan pemerintah daerah		100%	Rp 8.187.301.000,00			100%	Rp 8.187.301.000,00
5	02	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketetapan waktu penyelesaian dokumen perencanaan		100%	Rp 70.000.000,00			100%	Rp 70.000.000,00
5	02	1	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKAD	2 Dokumen	Rp 15.000.000,00	APBD		2 Dokumen	Rp 15.000.000,00
5	02	1	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BPKAD	1 Dokumen	Rp 10.000.000,00	APBD		1 Dokumen	Rp 10.000.000,00
5	02	1	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BPKAD	1 Dokumen	Rp 7.500.000,00	APBD		1 Dokumen	Rp 7.500.000,00
5	02	1	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	BPKAD	1 Dokumen	Rp 10.000.000,00	APBD		1 Dokumen	Rp 10.000.000,00
5	02	1	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	BPKAD	1 Dokumen	Rp 7.500.000,00	APBD		1 Dokumen	Rp 7.500.000,00
5	02	1	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPKAD	3 Dokumen	Rp 20.000.000,00	APBD		3 Dokumen	Rp 20.000.000,00
5	02	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah		100%	Rp 6.049.000.000,00			100%	Rp 6.049.000.000,00
5	02	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BPKAD	49 Orang/Bulan	Rp 5.950.000.000,00	APBD		49 Orang/Bulan	Rp 5.950.000.000,00
5	02	1	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BPKAD	12 Dokumen	Rp 59.000.000,00	APBD		12 Dokumen	Rp 59.000.000,00
5	02	1	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPKAD	1 Laporan	Rp 30.000.000,00	APBD		1 Laporan	Rp 30.000.000,00

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana			
5	02	1	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BPKAD	1 Laporan	Rp 10.000.000,00	APBD		1 Laporan	Rp 10.000.000,00
5	02	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pengadministrasi barang milik daerah perangkat daerah		100%	Rp 20.900.000,00				Rp 20.900.000,00
5	02	1	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	BPKAD	1 Laporan	Rp 20.900.000,00	APBD		1 Laporan	Rp 20.900.000,00
5	02	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi kepegawaian pada perangkat daerah		100%	Rp 70.000.000,00				Rp 70.000.000,00
5	02	1	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atributnya	BPKAD	49 Orang/Bulan	Rp 35.000.000,00	APBD		49 Orang/Bulan	Rp 35.000.000,00
5	02	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	BPKAD	10 orang	Rp 35.000.000,00	APBD		10 orang	Rp 35.000.000,00
5	02	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran		100%	Rp 287.950.000,00			100%	Rp 287.950.000,00
5	02	1	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	BPKAD	1 paket	Rp 28.000.000,00	APBD		1 paket	Rp 28.000.000,00
5	02	1	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BPKAD	1 paket	Rp 59.250.000,00	APBD		1 paket	Rp 59.250.000,00
5	02	1	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	BPKAD	1 paket	Rp 36.000.000,00	APBD		1 paket	Rp 36.000.000,00
5	02	1	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	BPKAD	1 paket	Rp 35.000.000,00	APBD		1 paket	Rp 35.000.000,00
5	02	1	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	BPKAD	1 paket	Rp 30.000.000,00	APBD		1 paket	Rp 30.000.000,00
5	02	1	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKAD	10 kali	Rp 84.700.000,00	APBD		10 kali	Rp 84.700.000,00
5	02	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BPKAD	4500 arsip	Rp 15.000.000,00	APBD		4500 arsip	Rp 15.000.000,00
5	02	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor		100%	Rp 1.205.601.000,00			100%	Rp 1.205.601.000,00
5	02	1	2.07	02	Pengadaan kendaraan dinas operasional dan lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	BPKAD	3 unit	Rp 432.500.000,00	APBD		3 unit	Rp 432.500.000,00
5	02	1	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	BPKAD	-	Rp -	APBD		-	Rp -
5	02	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	BPKAD	-	Rp -	APBD		-	Rp -
5	02	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	BPKAD	154 buah	Rp 773.101.000,00	APBD		154 buah	Rp 773.101.000,00

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana			
5	02	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan kantor		100%	Rp 362.600.000,00			100%	Rp 362.600.000,00
5	02	1	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPKAD	-	Rp -	APBD		50 laporan	Rp -
5	02	1	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	BPKAD	36 laporan	Rp 240.000.000,00	APBD		36 laporan	Rp 240.000.000,00
5	02	1	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	BPKAD	12 laporan	Rp 122.600.000,00	APBD		12 laporan	Rp 122.600.000,00
5	02	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah		100%	Rp 121.250.000,00			100%	Rp 121.250.000,00
5	02	1	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	BPKAD	1 unit	Rp 23.000.000,00	APBD		1 unit	Rp 23.000.000,00
5	02	1	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	BPKAD	22 unit	Rp 42.000.000,00	APBD		22 unit	Rp 42.000.000,00
5	02	1	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	BPKAD	1 gedung	Rp 5.000.000,00	APBD		1 gedung	Rp 5.000.000,00
5	02	1	2.09	10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	BPKAD	53 unit	Rp 21.500.000,00	APBD		53 unit	Rp 21.500.000,00
5	02	1	2.09	11	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	BPKAD	30 unit	Rp 29.750.000,00	APBD		30 unit	Rp 29.750.000,00
5	02	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen penganggaran, perbendaharaan dan pelaporan keuangan daerah		100%	Rp 149.166.498.740,00			100%	Rp 149.166.498.740,00
5	02	2	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran		100%	Rp 2.391.555.600,00			100%	Rp 2.391.555.600,00
5	02	2	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	BPKAD	2 dokumen	Rp 278.745.300,00	APBD		2 dokumen	Rp 278.745.300,00
5	02	2	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	BPKAD	2 dokumen	Rp 215.352.000,00	APBD		2 dokumen	Rp 215.352.000,00
5	02	2	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	BPKAD	31 Dokumen	Rp 166.063.850,00	APBD		31 Dokumen	Rp 166.063.850,00
5	02	2	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	BPKAD	31 Dokumen	Rp 185.756.150,00	APBD		31 Dokumen	Rp 185.756.150,00
5	02	2	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	BPKAD	31 Dokumen	Rp 83.475.000,00	APBD		31 Dokumen	Rp 83.475.000,00
5	02	2	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	BPKAD	31 Dokumen	Rp 98.600.000,00	APBD		31 Dokumen	Rp 98.600.000,00

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana			
5	02	2	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKAD	2 dokumen	Rp 604.782.660,00	APBD		2 dokumen	Rp 604.782.660,00
5	02	2	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD	2 dokumen	Rp 538.590.640,00	APBD		2 dokumen	Rp 538.590.640,00
5	02	2	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BPKAD	4 Dokumen	Rp 220.190.000,00	APBD		4 Dokumen	Rp 220.190.000,00
5	02	2	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perbendaharaan		100%	Rp 688.484.990,00			100%	Rp 688.484.990,00
5	02	2	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKAD	264 dokumen	Rp 24.200.000,00	APBD		264 dokumen	Rp 24.200.000,00
5	02	2	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BPKAD	860 dokumen	Rp 33.275.000,00	APBD		860 dokumen	Rp 33.275.000,00
5	02	2	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BPKAD	7 dokumen	Rp 78.650.000,00	APBD		7 dokumen	Rp 78.650.000,00
5	02	2	2.02	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	BPKAD	12 dokumen	Rp 47.789.990,00	APBD		12 dokumen	Rp 47.789.990,00
5	02	2	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	BPKAD	2 laporan	Rp 203.280.000,00	APBD		2 laporan	Rp 203.280.000,00
5	02	2	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	BPKAD	12 dokumen	Rp 227.480.000,00	APBD		12 dokumen	Rp 227.480.000,00
5	02	2	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	BPKAD	20 dokumen	Rp 40.535.000,00	APBD		20 dokumen	Rp 40.535.000,00
5	02	2	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	31 orang	Rp 33.275.000,00	APBD		31 orang	Rp 33.275.000,00
5	02	2	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen pelaporan keuangan daerah		100%	Rp 1.130.000.000,00			100%	Rp 1.130.000.000,00

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana			
5	02	2	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	BPKAD	372 laporan	Rp 40.000.000,00	APBD		372 laporan	Rp 40.000.000,00
5	02	2	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	BPKAD	124 dokumen	Rp 215.000.000,00	APBD		124 dokumen	Rp 215.000.000,00
5	02	2	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BPKAD	1 laporan	Rp 40.000.000,00	APBD		1 laporan	Rp 40.000.000,00
5	02	2	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	BPKAD	2 laporan	Rp 290.000.000,00	APBD		2 laporan	Rp 290.000.000,00
5	02	2	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BPKAD	4 dokumen	Rp 250.000.000,00	APBD		4 dokumen	Rp 250.000.000,00
5	02	2	2.03	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD	1 dokumen	Rp 40.000.000,00	APBD		1 dokumen	Rp 40.000.000,00
5	02	2	2.03	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD	1 dokumen	Rp 40.000.000,00	APBD		1 dokumen	Rp 40.000.000,00
5	02	2	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	BPKAD	2 dokumen	Rp 75.000.000,00	APBD		2 dokumen	Rp 75.000.000,00
5	02	2	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKAD	1 dokumen	Rp 50.000.000,00	APBD		1 dokumen	Rp 50.000.000,00
5	02	2	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	31 orang	Rp 50.000.000,00	APBD		31 orang	Rp 50.000.000,00
5	02	2	2.03	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	BPKAD	1 lembaga	Rp 40.000.000,00	APBD		1 lembaga	Rp 40.000.000,00
5	02	2	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase capaian pelaksanaan kegiatan penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		100%	Rp 144.458.458.150,00			100%	Rp 144.458.458.150,00
5	02	2	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BPKAD	1 laporan	Rp 130.000.000.000,00	APBD		1 laporan	Rp 130.000.000.000,00
5	02	2	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKAD	1 laporan	Rp 7.000.000.000,00	APBD		1 laporan	Rp 7.000.000.000,00
5	02	2	2.04	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	BPKAD	1 laporan	Rp 7.458.458.150,00	APBD		1 laporan	Rp 7.458.458.150,00
5	02	2	2.05		Pengelolaan Data Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase capaian Pengelolaan Data Sistem Informasi Pemerintah Daerah		100%	Rp 498.000.000,00			100%	Rp 498.000.000,00

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana			
5	02	2	2.05	2	Implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	BPKAD	1 dokumen	Rp 498.000.000,00	APBD		1 dokumen	Rp 498.000.000,00
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen barang milik daerah sesuai ketentuan		100%	Rp 3.530.847.668,00			100%	Rp 3.530.847.668,00
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen penatausahaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemindahtanganan dan penghapusan BMD sesuai ketentuan		100%	Rp 3.530.847.668,00			100%	Rp 3.530.847.668,00
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	BPKAD	1 dokumen	Rp 271.998.725,00	APBD		1 dokumen	Rp 271.998.725,00
5	02	03	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKAD	1 dokumen	Rp 146.762.795,00	APBD		1 dokumen	Rp 146.762.795,00
5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKAD	5 dokumen	Rp 146.762.795,00	APBD		5 dokumen	Rp 146.762.795,00
5	02	03	2.01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	4 dokumen	Rp 273.937.725,00	APBD		4 dokumen	Rp 273.937.725,00
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	BPKAD	1 laporan	Rp 588.662.875,00	APBD		1 laporan	Rp 588.662.875,00
5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	BPKAD	2 laporan	Rp 824.812.093,00	APBD		2 laporan	Rp 824.812.093,00
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKAD	3 laporan	Rp 185.000.000,00	APBD		3 laporan	Rp 185.000.000,00
5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	BPKAD	2 laporan	Rp 274.895.000,00	APBD		2 laporan	Rp 274.895.000,00
5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	5 laporan	Rp 165.575.000,00	APBD		5 laporan	Rp 165.575.000,00
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKAD	10 dokumen	Rp 135.000.000,00	APBD		10 dokumen	Rp 135.000.000,00
5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKAD	2 laporan	Rp 100.322.150,00	APBD		2 laporan	Rp 100.322.150,00
5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	BPKAD	1 laporan	Rp 155.749.300,00	APBD		1 laporan	Rp 155.749.300,00
5	02	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	31 orang	Rp 261.369.210,00	APBD		31 orang	Rp 261.369.210,00

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Renja BPKAD) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya mengalir kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Renja BPKAD Kabupaten Mempawah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan teknis tahunan, sebagai implementasi dari Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Renstra BPKAD) Kabupaten Mempawah Tahun 2025 – 2026 yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan serta target-target capaian sasaran yang harus dicapai pada tahun 2025. Rencana Kerja ini selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun



2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja BPKAD. Rencana Kerja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf kearah yang lebih baik dimasa datang.

Disusunnya Renja BPKAD Tahun 2025 diharapkan menjadi bahan bagi Aparatur BPKAD Kabupaten Mempawah dalam mewujudkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan bersama untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Demikian semoga Renja BPKAD Kabupaten Mempawah ini dapat bermanfaat bagi pelaksanaan tugas aparat Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya, serta Pemerintah Kabupaten Mempawah pada umumnya.

Mempawah, 29 Februari 2024

KEPALA BPKAD
KABUPATEN MEMPAWAH



Dra. IRMAWATI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720510 199203 2 009